



RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDUNG

TAHUN 2026



Kota Bandung
Diskominfo
Communicate, Collaborate, Create



KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, khususnya dalam rencana tahunan. Disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2026.

Buku Rencana Kerja Perubahan tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Namun demikian kita menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada rencana tahunan ini, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, 13 Agustus 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



HENRYCO ARIE SAPIIE, SE.Ak
Pembina TK.I/IVb
19710621 199806 1 001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lampiran Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai Triwulan II Tahun 2026 dan	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	32
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD	33
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55
BAB IV PENUTUP	76

Lampiran-lampiran Tabel	
	Halaman
Tabel 2.1	15
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Kota Bandung sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	
Tabel 2.2.....	38
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	
Tabel 2.3.....	45
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Sebelum Perubahan	
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026 Kota Bandung	
Tabel 2.4.....	45
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Sesudah Perubahan	
Tabel 2.5.....	47
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2026 Kota Bandung	
Tabel 3.1.....	60
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung Sebelum Perubahan	
Tabel 3.2.....	67
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bandung Sesudah Perubahan	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang

sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Disamping itu pula penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni: Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun Renstra, Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKAP). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian; yang meliputi; Perencanaan komunikasi, diseminasi informasi, teknologi informasi,

Persandian (Keamanan Aplikasi); melaksanakan pelayanan teknis administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri PAN-RB No.59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
10. Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 adalah :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan samapi dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2026;
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;

- 3) Menjadikan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026.
- 5) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja PerubahanDinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.
<i>BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024</i>	Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD samapi Triwulan tahun berkenan dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
<i>Bab III Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah</i>	Menguraikan rencana kerja dan pendanaannya perangkat daerah dan perkiraan maju
<i>BAB IV Penutup</i>	Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja tahunan



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Sampai Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian dua sasaran strategis, yaitu **(1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel**, serta **(2) Meningkatnya kinerja dan pelayanan komunikasi dan informatika**.

1. Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel

Pencapaian Sasaran 1 didukung oleh empat program, yaitu Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, serta Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan capaian kinerja yang sesuai dengan target. Indikator Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi terealisasi sebesar 10,00 dari target 10,00 atau 100%. Nilai Penerapan SPBE Lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan juga

mencapai 16,20 dari target 16,20 atau 100%, sedangkan Nilai Penerapan SPBE Lingkup Infrastruktur mencapai 10,00 dari target 10,00 atau 100%. Selanjutnya, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai 3,05 dari target 3,05 atau 100%.

Dari sisi anggaran, program ini memiliki pagu sebesar Rp7.210.373.501,00. Pada Triwulan II, target anggaran sebesar Rp3.381.098.771,00, dengan realisasi sebesar Rp1.985.345.058,00 atau 58,72%, yang setara dengan 27,53% dari pagu anggaran tahunan. Pelaksanaan program didukung oleh koordinasi dan kerja sama antara rekan kerja, tenaga ahli, serta staf bidang aplikasi informatika dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan aplikasi. Adapun salah satu faktor yang masih perlu diperhatikan adalah perlunya penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan, terutama karena beberapa indikator penilaian SPBE dilaksanakan pada akhir tahun dan memerlukan penyesuaian serta pengkategorian ulang terhadap beberapa aspek penilaian.

b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Triwulan II telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik terealisasi sebesar 5,08 dari target 5,08 atau 100%, sementara Indeks Pembangunan Statistik terealisasi sebesar 3,05 dari target 3,05 atau 100%.

Dari aspek keuangan, pagu anggaran program sebesar Rp650.000.000,00. Target anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp328.935.000,00, dengan realisasi sebesar Rp261.867.900,00 atau 79,61%, atau sebesar 40,29% dari pagu anggaran tahunan. Pelaksanaan program secara umum berjalan sesuai dengan target dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan data dan statistik sektoral.

c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Triwulan II menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%,

dengan Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian sebesar 3,70, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp335.700.000,00, dengan target anggaran Triwulan II sebesar Rp105.708.000,00 dan realisasi sebesar Rp94.723.000,00 atau 89,61%, atau 28,22% dari pagu anggaran tahunan. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh tenaga/konsultan yang membantu dalam pelaksanaan Surveillance ISO 27001, sehingga proses pengamanan informasi dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Triwulan II secara umum telah mencapai target kinerja. Nilai Penerapan SPBE Lingkup Layanan Informasi terealisasi sesuai target sebesar 3,00 atau 100%. Selain itu, Nilai Layanan Informasi Masyarakat melalui Radio mencapai target 0,04 atau 100%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata terealisasi sebesar 88,62, lebih tinggi dari target 88,60, atau mencapai 100,02%.

Dari sisi anggaran, program ini memiliki pagu sebesar Rp6.472.579.276,24. Target anggaran Triwulan II sebesar Rp4.406.088.050,00, dengan realisasi sebesar Rp2.321.383.737,00 atau 52,69%, atau 35,86% dari pagu anggaran tahunan. Pelaksanaan program secara umum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hambatan minor dalam pelaksanaan, namun dapat diatasi sehingga target kinerja tetap dapat dipenuhi. Pelayanan informasi masyarakat melalui radio juga dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.

Secara keseluruhan, Sasaran 1 pada Triwulan II didukung oleh total pagu anggaran sebesar Rp14.668.652.777,24. Sampai dengan Triwulan II, target anggaran sebesar Rp8.221.829.821,00 telah terealisasi sebesar Rp4.663.319.695,00 atau 56,72%, yang setara dengan 31,79% dari total pagu tahunan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Sasaran 2 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi 100% atau capaian 100%. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II karena penilaiannya dilakukan pada periode yang telah ditentukan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki pagu anggaran sebesar Rp23.896.389.399,76. Target anggaran Triwulan II sebesar Rp17.484.828.166,00, dengan realisasi sebesar Rp11.831.563.357,00 atau 67,67%, atau sebesar 49,51% dari pagu anggaran tahunan.

Pelaksanaan program secara umum berjalan baik. Berbagai hambatan teknis maupun nonteknis yang muncul selama pelaksanaan dapat diatasi melalui koordinasi dan kolaborasi antarpegawai serta pihak terkait, sehingga pelayanan administrasi perkantoran tetap dapat terselenggara sesuai target.

Secara keseluruhan, Sasaran 2 memiliki pagu anggaran sebesar Rp23.896.389.399,76, dengan target anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp25.706.657.987,00 dan realisasi sebesar Rp11.831.563.357,00 atau 46,03%, atau 49,51% dari pagu anggaran tahunan.

3. Kesimpulan Realisasi Triwulan II

Berdasarkan hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Sebagian besar indikator yang memang ditargetkan untuk dicapai pada Triwulan II telah terealisasi sebesar 100%, bahkan terdapat indikator yang melampaui target, yaitu IKM Radio Sonata dengan capaian 100,02%.

Dari sisi anggaran, total pagu pada kedua sasaran strategis sebesar Rp38.565.042.177,00. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II terus diarahkan untuk menjaga kesesuaian antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja meliputi koordinasi dan kolaborasi internal, dukungan tenaga ahli/konsultan, serta komitmen pelaksana kegiatan. Sementara itu, beberapa faktor penghambat seperti perlunya

penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan, penyesuaian terhadap indikator penilaian yang relatif baru, serta adanya hambatan teknis dan nonteknis masih perlu dikelola melalui koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 dapat dinilai berjalan efektif dan mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dengan tetap diperlukan optimalisasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan Triwulan IV untuk memastikan seluruh target tahunan dapat tercapai.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sampai Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Sampai Triwulan II Tahun 2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Triwulan 1			Triwulan 2			Pagu Anggaran Tahun 2026	Triwulan 1				Triwulan 2			
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% thdp Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% thdp Tahun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel																			
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE Lingkup Aplikasi	Nilai	10.00	10.00	10	100	10.00	100	100	7.210.373.501,00	661.156.001,00	398.438.750,00	60,26	5,53	3.381.098.771,00	1.985.345.058,00	58,72	27,53
		Nilai Penerapan SPBE Lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Nilai	16.20	16.20	16.20	100	16.20	16.20	100									
		Nilai Penerapan SPBE Lingkup Infrastruktur	Nilai	10.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00	100									
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintah	Nilai	03.05	03.05	03.05	100	03.05	03.05	100									

				an Berbasis Elektronik																	
	01.01	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	Aplikasi	114	-	-	n/a	-	-	n/a	7.210.373.501,00	661.156.001,00	398.438.750,00	60,26	5,53	3.381.098.771,00	1.985.345.058,00	58,72	27,53
				Cakupan leveling Pemerintah an Digital	Level	2	-	-	n/a	-	-	n/a									
				Prosentase keterhubu ngan layanan internet Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100									
		01.01.01	Koordin asi Pemanf aatan Pusat Data Nasion al	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatka n di Pusat Data Nasional	Aplikasi	35	8	8	100	9	9	100	1.356.100.000,00	162.050.000,00	145.488.750,00	89,78	10,73	642.962.300,00	325.157.572,00	50,57	23,98
		01.01.02	Koordin asi pelaksa naan Manaje men SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaa n Manajemen SPBE	Dokume n	1	-	-	n/a	1	1	100	251.525.400,00	53.636.340,00	19.106.000,00	35,62	7,6	162.200.260,00	38.000.800,00	23,43	15,11
		01.01.03	Penyele nggara an Jaringa n Intra Pemerin tah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/ Kota yang terhubung dengan Jaringan	Perangk at Daerah	200	50	50	100	50	50	100	2.912.160.801,00	40.913.791,00	5.176.000,00	12,65	0,18	1.146.070.351,00	868.372.964,00	75,77	29,82

			Kab/ Kota	Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota																	
		01.01.04	Koordinasi pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	5	1	1	100	1	1	100	837.513.300,00	122.640.000,00	122.500.000,00	99,89	14,63	335.070.040,00	292.644.000,00	87,34	34,94
		01.01.05	Penyelesaian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	4	1	1	100	1	1	100	177.020.000,00	33.042.500,00	30.672.000,00	92,83	17,33	80.963.000,00	76.968.000,00	95,07	43,48

			dan integrasi layanan																			
		01.01.06	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	200	200	-	100	-	-	n/a	1.176.054.000,00	80.970.000,00	51.275.000,00	63,33	4,36	551.670.450,00	307.688.722,00	55,77	26,16	
		01.01.07	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	2	-	-	n/a	-	-	n/a	200.000.000,00	83.152.370,00	0	0	0	166.152.370,00	18.847.000,00	11,34	9,42	
		01.01.08	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	Dokumen	2	-	-	n/a	1	2	200	300.000.000,00	84.751.000,00	24.221.000,00	28,58	8,07	296.010.000,00	57.666.000,00	19,48	19,22	

			atau Kota Cerdas	Kabupaten / Kota Cerdas																	
TOTAL PER PROGRAM							Triwulan 1		100	Triwulan 2		325	7.210.373.501,00	661.156.001,00	398.438.750,00	60,26	5,53	3.381.098.771,00	1.985.345.058,00	58,72	27,53
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Nilai Penerapan SPBE Lingkup Data dan Statistik	Nilai	05.08	05.08	05.08	100	05.08	05.08	100	650.000.000,00	105.276.000,00	85.507.300,00	81,22	13,15	328.935.000,00	261.867.900,00	79,61	40,29
				Indeks Pembangu nan Statistik	Nilai	03.05	03.05	03.05	100	03.05	03.05	100									
	02.01	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sessuai dengan standar data	%	100	100	100	100	100	100	100	650.000.000,00	105.276.000,00	85.507.300,00	81,22	13,15	328.935.000,00	261.867.900,00	79,61	40,29
		02.0 1.01	Pemenu han Prinsip Satu Data Indones ia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperab	%	100	100	100	100	100	100	100	200.627.600,00	40.320.000,00	38.285.000,00	94,95	19,08	95.499.000,00	93.549.900,00	97,96	46,63

				ilitas data dan kode referensi dan/ atau data induk																	
		02.01.02	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	100	100	100	100	100	100	236.211.000,00	25.200.000,00	9.300.000,00	36,9	3,94	133.551.000,00	73.842.250,00	55,29	31,26
		02.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	30	-	-	n/a	30	30	100	213.161.400,00	39.756.000,00	37.922.300,00	95,39	17,79	99.885.000,00	94.475.750,00	94,58	44,32
TOTAL PER PROGRAM							Triwulan 1		100	Triwulan 2		100	650.000.000,00	105.276.000,00	85.507.300,00	81,22	13,15	328.935.000,00	261.867.900,00	79,61	40,29
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Nilai Penerapan SPBE Lingkup Persandian	Nilai	3,7	3,7	3,7	100	3,7	3,7	100	335.700.000,00	42.018.000,00	37.070.500,00	88,23	11,04	105.708.000,00	94.723.000,00	89,61	28,22

	03.01	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanan nya	Aplikasi	7	1	1	100	2	2	100	335.700.000,00	42.018.000,00	37.070.500,00	88,23	11,04	105.708.000,00	94.723.000,00	89,61	28,22
		03.0 1.01	Penyedi aan Layana n Keama nan Informa si dan Persan dian Pemerin tah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunak an Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangk at Daerah	7	1	1	100	2	2	100	335.700.000,00	42.018.000,00	37.070.500,00	88,23	11,04	105.708.000,00	94.723.000,00	89,61	28,22
TOTAL PER PROGRAM							Triwulan 1		100	Triwulan 2		100	335.700.000,00	42.018.000,00	37.070.500,00	88,23	11,04	105.708.000,00	94.723.000,00	89,61	28,22
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Nilai Penerapan SPBE Lingkup Layanan Informasi	Nilai	03.00	03.00	3	100	03.00	03.00	100	6.472.579.276,24	2.359.302.480,00	1.157.276.790,00	49,05	17,88	4.406.088.050,00	2.321.383.737,00	52,69	35,86
				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyaraka t (LAPOR) yang Sudah	Nilai	4	-	-	n/a	-	-	n/a									

				Diselesaikan																	
Nilai Layanan Informasi Masyarakat Melalui Radio				Nilai	04	04	04	100	04	04	100										
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata				Nilai	88.60	-	-	n/a	88.60	88.62	100										
	04.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	%	93	-	-	n/a	-	-	n/a	6.472.579.276,24	2.359.302.480,00	1.157.276.790,00	49,05	17,88	4.406.088.050,00	2.321.383.737,00	52,69	35,86
		04.01.01	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	4	1	1	100	1	1	100	3.469.281.516,24	1.568.090.000,00	814.128.440,00	51,92	23,47	2.715.090.000,00	1.418.110.170,00	52,23	40,88

		04.0 1.02	Kemitraan Komunitas dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	-	-	n/a	1	1	100.00.00	18.555.500,00	10.009.500,00	0	0	0	18.555.500,00	5.410.460,00	29,16	29,16
		04.0 1.03	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-an	Permohonan	5	1	1	100	1	1	100	483.000.000,00	71.250.000,00	47.500.000,00	66,67	9,83	250.976.640,00	103.750.000,00	41,34	21,48
		04.0 1.04	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	3	-	-	n/a	2	2	100	1.096.452.500,00	213.122.500,00	78.097.500,00	36,64	7,12	622.228.550,00	330.757.007,00	53,16	30,17
		04.0 1.05	Pengelolaan Media Komunitas Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar	Media	1	1	1	100	-	-	n/a	1.103.356.460,00	374.030.000,00	200.665.850,00	53,65	18,19	592.430.000,00	386.185.850,00	65,19	35

				sesuai kriteria/juknis UPT Radio Sonata																	
		04.01.06	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	10	2	2	100	3	3	100	210.000.000,00	120.558.480,00	15.600.000,00	12,94	7,43	149.917.360,00	73.647.750,00	49,13	35,07
		04.01.07	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	12	3	3	100	3	3	100	61.200.000,00	2.242.000,00	1.285.000,00	57,31	2,1	56.637.000,00	3.272.500,00	5,78	5,35
		04.01.08	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	50	-	-	n/a	50	50	100	30.733.300,00	0	0	nan	0	0	250.000,00	inf	0,81
TOTAL PER PROGRAM							Triwulan 1		6.3	Triwulan 2		75,01	6.472.579.276,24	2.359.302.480,00	1.157.276.790,00	49,05	17,88	4.406.088.050,00	2.321.383.737,00	52,69	35,86

TOTAL PER SASARAN				Triwulan 1				1.643,75	Triwulan 2				150	14.668.652.777,24		3.167.752.481,00		1.678.293.340,00		52,98		11,44		8.221.829.821,00		4.663.319.695,00		56,72		31,79	
Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Komunikasi dan Informatika																															
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	-	-	n/a	-	-	n/a	23.896.389.399,76	9.543.623.829,00	5.282.930.753,00	55,36	22,11	17.484.828.166,00	11.831.563.357,00	67,67	49,51										
				Persentase layanan administrasi perkantoran yang terselenggara dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100																			
	01.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	18.566.152.077,25	7.433.636.917,00	4.205.649.137,00	56,58	22,65	13.799.463.317,00	9.509.931.985,00	68,92	51,22										
		01.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	77	77	77	100	77	77	100	18.566.152.077,25	7.433.636.917,00	4.205.649.137,00	56,58	22,65	13.799.463.317,00	9.509.931.985,00	68,92	51,22										

	01.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Administarsi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	1.220.089.369,43	691.854.793,00	426.583.560,00	61,66	34,96	972.047.652,00	692.443.426,00	71,24	56,75
		01.02.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	-	-	n/a	3	3	100	405.498.576,22	377.499.576,00	295.489.170,00	78,28	72,87	404.499.576,00	353.233.670,00	87,33	87,11
		01.02.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	-	-	n/a	3	3	100	62.041.766,70	62.041.767,00	47.635.290,00	76,78	76,78	62.041.767,00	48.385.290,00	77,99	77,99
		01.02.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	2	-	-	n/a	2	2	100	18.763.590,51	18.763.591,00	16.517.000,00	88,03	88,03	18.763.591,00	16.517.000,00	88,03	88,03
		01.02.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	3	3	100	3	3	100	25.235.436,00	6.308.859,00	1.950.000,00	30,91	7,73	12.617.718,00	7.800.000,00	61,82	30,91

		01.02.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	Laporan	12	3	3	100	3	3	100	505.659.000,00	185.350.000,00	38.891.800,00	20,98	7,69	371.234.000,00	203.132.600,00	54,72	40,17
		01.02.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	100	3	3	100	202.891.000,00	41.891.000,00	26.100.300,00	62,31	12,86	102.891.000,00	63.374.866,00	61,59	31,24
	01.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	3.076.309.213,08	913.576.679,00	512.059.558,00	56,05	16,65	1.827.133.357,00	1.218.753.348,00	66,7	39,62
		01.03.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	100	3	3	100	30.682.500,00	7.720.000,00	4.455.698,00	57,72	14,52	15.420.000,00	9.356.926,00	60,68	30,5
		01.03.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	3	3	100	3	3	100	3.045.626.713,08	905.856.679,00	507.603.860,00	56,04	16,67	1.811.713.357,00	1.209.396.422,00	66,75	39,71

	01.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	%	100	100	100	100	100	100										
		01.0 4.01	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak dan Perizina n Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinanny a	Unit	29	29	100	100	-	-	n/a	843.429.340,00	403.774.440,00	103.161.498,00	25,55	12,23	720.774.440,00	324.185.598,00	44,98	38,44
		01.0 4.02	Pemelih araan Peralat an dan Mesin Lainny a	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	200	-	-	n/a	200	200	100	190.409.400,00	100.781.000,00	35.477.000,00	35,2	18,63	165.409.400,00	86.249.000,00	52,14	45,3
TOTAL PER PROGRAM							Triwulan 1		50	Triwulan 2		50	23.896.389.399,76	9.543.623.829,00	5.282.930.753,00	55,36	22,11	17.484.828.166,00	11.831.563.357,00	67,67	49,51

TOTAL PER SASARAN	Triwulan 1	50	Triwulan 2	50	23.896.389.399,76	12.711.376.310,00	5.282.930.753,00	41,56	22,11	25.706.657.987,00	11.831.563.357,00	46,03	49,51
TOTAL PER PERANGKAT DAERAH	Triwulan 1	846,88	Triwulan 2	100	38.565.042.177,00	15.879.128.791,00	6.961.224.093,00	43,84	18,05	33.928.487.808,00	16.494.883.052,00	48,62	42,77

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari uraian dan tabel yang disajikan di atas, ada dukungan dan hambatan serta solusi yang dapat menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan kinerja tahun selanjutnya, yaitu;

Faktor Pendukung Realisasi Triwulan II Tahun 2026

Realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap sesuai dengan target kinerja dan prioritas yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi dan kolaborasi antarbidang serta antarpegawai yang berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara terintegrasi dan mampu mengatasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis yang muncul.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas, terutama dalam pengelolaan aplikasi informatika, SPBE, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi, serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
4. Dukungan tenaga ahli dan konsultan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, termasuk dukungan dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi serta pelaksanaan Surveillance ISO 27001.
5. Dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pelaksanaan layanan pemerintahan digital, pengelolaan informasi, serta pelayanan komunikasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
6. Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pemenuhan data, informasi, serta kebutuhan pelaksanaan dan evaluasi SPBE, statistik sektoral, persandian, dan layanan informasi publik.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga perkembangan capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat dipantau serta dilakukan langkah korektif apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Partisipasi dan respons positif masyarakat sebagai pengguna layanan, yang turut mendukung tercapainya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika. Hal tersebut antara lain tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah memenuhi bahkan melampaui target pada Triwulan II Tahun 2026.
9. Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan data dan informasi, keamanan informasi, serta pelayanan publik berbasis digital yang menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Secara keseluruhan, kombinasi antara komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi, dukungan tenaga ahli, ketersediaan sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Triwulan II Tahun 2026.

Hambatan yang Dihadapi Triwulan II Tahun 2026

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika secara umum dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Perlunya penyamaan persepsi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, khususnya dalam pelaksanaan dan pemenuhan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan data, serta penyusunan dan penerapan kebijakan terkait transformasi digital.
2. Adanya penyesuaian terhadap indikator dan mekanisme penilaian SPBE, terutama pada indikator yang relatif baru. Kondisi tersebut membutuhkan proses pemahaman, penyesuaian, serta pengelompokan kembali beberapa aspek agar pemenuhan bukti dukung dan penilaian dapat dilakukan secara tepat.
3. Sebagian indikator kinerja belum dapat diukur pada Triwulan II karena proses penilaian atau evaluasinya dilaksanakan pada akhir tahun atau pada periode tertentu. Kondisi ini menyebabkan realisasi beberapa

indikator belum dapat menggambarkan capaian akhir tahun secara keseluruhan.

4. Keterbatasan dan kebutuhan pemutakhiran data serta bukti dukung, khususnya dalam mendukung pengukuran kinerja SPBE, statistik sektoral, keamanan informasi, dan indikator pelayanan lainnya. Pemenuhan data memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah maupun pihak terkait.
5. Masih terdapat hambatan teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan aplikasi serta layanan teknologi informasi. Hambatan tersebut memerlukan penanganan dan koordinasi secara cepat agar tidak mengganggu pencapaian target.
6. Penyerapan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan target pada beberapa program, sehingga diperlukan pengendalian dan percepatan pelaksanaan kegiatan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan agar realisasi anggaran pada Triwulan III dan IV dapat lebih optimal.
7. Kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, keamanan informasi, serta perubahan kebijakan dan standar penyelenggaraan SPBE.
8. Koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat, mengingat sebagian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika membutuhkan dukungan data, informasi, dan partisipasi dari perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun terdapat beberapa hambatan tersebut, secara umum hambatan yang muncul pada Triwulan II Tahun 2026 masih dapat dikendalikan dan diatasi melalui koordinasi, kolaborasi, monitoring, serta evaluasi secara berkala. Kondisi tersebut tidak menghambat pencapaian sebagian besar target kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hambatan yang masih ada akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026.

Solusi atas Hambatan yang Dihadapi Triwulan II Tahun 2026

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah dan akan melakukan beberapa langkah perbaikan untuk memastikan pencapaian target kinerja dan optimalisasi realisasi anggaran. Upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam pemenuhan indikator SPBE, pengelolaan data, statistik sektoral, keamanan informasi, serta layanan komunikasi dan informatika.
2. Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap pemenuhan indikator SPBE, termasuk melakukan identifikasi indikator, pemetaan kebutuhan bukti dukung, serta penyesuaian terhadap perubahan atau indikator penilaian yang masih relatif baru.
3. Memperkuat pengelolaan dan pemutakhiran data serta bukti dukung kinerja melalui inventarisasi, verifikasi, dan dokumentasi secara berkala, sehingga data yang diperlukan untuk evaluasi dan penilaian dapat tersedia secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan sejak dini dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
5. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan menyusun kembali jadwal pelaksanaan kegiatan, menetapkan skala prioritas, serta melakukan koordinasi antara pejabat/pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan agar target fisik dan keuangan dapat tercapai secara optimal pada Triwulan III dan IV.
6. Meningkatkan koordinasi teknis dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi untuk meminimalkan gangguan layanan serta memastikan aplikasi yang digunakan dapat mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan dan masyarakat.
7. Mengoptimalkan dukungan tenaga ahli atau konsultan pada kegiatan yang membutuhkan kompetensi khusus, termasuk dalam bidang keamanan informasi, penerapan standar ISO 27001, pengembangan aplikasi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE.

8. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembinaan, asistensi, berbagi pengetahuan, dan penguatan kapasitas teknis agar pegawai mampu mengikuti perkembangan teknologi, kebijakan, dan standar penyelenggaraan pemerintahan digital.
9. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengumpulan data, penyediaan informasi, pemenuhan bukti dukung, dan pelaksanaan program yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sehingga ketergantungan antar unit kerja dapat dikelola dengan lebih baik.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi kepuasan masyarakat sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan. Capaian IKM yang telah memenuhi dan melampaui target pada Triwulan II perlu dipertahankan melalui peningkatan kualitas, kecepatan, kemudahan, dan responsivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa hambatan yang muncul pada Triwulan II Tahun 2026 tidak berlanjut pada periode berikutnya. Melalui penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan target. Ada 2 indikator Indikator Kinerja Utama, Pada Tahun 2026 dari 2 indikator ini ada 1 indikator yang melebihi target yaitu; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 2. indikator yang sesuai tergap yaitu; Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka; Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk Tahun 2026 analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sampai Triwulan II, yaitu ;

Analisis SPBE Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target IKU SPBE ditetapkan sebesar 4,68, sedangkan berdasarkan hasil penilaian mandiri, realisasi capaian juga sebesar 4,68.

Dengan demikian, capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 100% dari target, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan SPBE telah berjalan sesuai dengan arah dan sasaran kinerja yang ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, maupun layanan SPBE.

Selanjutnya, hasil penilaian mandiri ini perlu menjadi dasar untuk mempertahankan capaian yang telah diperoleh sekaligus melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap aspek-aspek SPBE yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, sehingga pada periode berikutnya kualitas dan kematangan penerapan SPBE dapat terus meningkat.

Analisis IKM Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan capaian yang sangat baik. Target IKM yang ditetapkan sebesar 95,91, sedangkan realisasi mencapai 95,95. Dengan demikian, realisasi IKM melampaui target sebesar 0,04 poin, atau mencapai sekitar 100,04% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan sangat baik dan mampu

memenuhi harapan pengguna layanan. Tingginya nilai IKM juga mencerminkan adanya penerimaan dan penilaian positif masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan yang diberikan.

Meskipun target telah tercapai dan terlampaui, peningkatan kualitas pelayanan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan, peningkatan responsivitas petugas, kemudahan akses layanan, serta tindak lanjut atas masukan dan saran masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat pada periode berikutnya.

Seiring dengan adanya Undang Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 (RPJPN 2025-2045): Menetapkan transformasi digital sebagai penggerak utama menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi). Kebijakan ini memperbarui pendekatan evaluasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebelumnya menjadi Indeks Pemerintah Digital yang lebih berfokus pada dampak kualitas layanan publik.

Penerapan regulasi ini secara spesifik mengukur lima prioritas utama: tata kelola, teknologi, kompetensi dan budaya digital, layanan digital publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Pengukuran Indikator Pemerintah Digital ini berlaku mulai Tahun 2026;

Selain Indikator Kinerja Utama, juga layanan Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung yaitu ada 5 indikator yang terdiri dari 3 urusan, yaitu;

1. Urusan Komunikasi dan Informatika ada 3 indikator, yaitu; Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi ; dan Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Statistik ada 1 indikator, yaitu; Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah.
3. Urusan Persandian ada 1 indikator, yaitu; Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Untuk lebih jelas dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (Thn n-2)	Tahun 2025 (Thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,5	4,62	4,65	4,68	4,59	4,66	4,68	4,68	IKU 2025-2029
	Indeks Pemerintah Digital			NA	NA	1,87	2,0	NA	-	1,87	2,0	IKU 2025-2029 REVIU
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			88,40	95,90	96,06	96,07	95,89	96,05	96,06	96,07	IKU 2025-2029 REVIE
			Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung									
1			Persentase Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh	13,09	7,14	1,64	1,64	13,09	7,14	1,64	1,64	IKK 2025-2029 REVIU

			Dinas Komunikasi dan Informatika;									
2			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi ;	17%	30%	43%	57%	17%	30%	43%	57%	IKK 2025-2029 REVIU
3			Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	NA	NA	NA	10%	NA	NA	10%	10%	IKK 2025-2029 REVIU
4			Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah.	NA	NA	50%	54%	NA	NA	50%	54%	IKK 2025-2026 REVIU
5			Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	64	64	67	70	64	64	67	70	IKK 2025-2026 REVIU

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Keterkaitan ini menjadi peluang eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kinerja pembangunan, yaitu;

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik;
2. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
3. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;
4. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung;
5. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain;
6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi;
7. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Sedangkan tantangan atau ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kinerja pembangunan ini, yaitu.

1. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum didukung maksimal;
2. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan;
3. Belum adanya standarisasi aplikasi integrasi;
4. Tingkat literasi internet belum merata;
5. Belum optimalnya keamanan data;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap perkembangan transformasi digital pemerintahan. Semula, arah tujuan dan sasaran lebih menitikberatkan pada **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, namun selanjutnya diperluas menjadi **Pemerintahan Digital**.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan transformasi digital, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indeks, penerapan aplikasi, maupun pemenuhan aspek-aspek SPBE, tetapi juga mencakup keseluruhan proses transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terpadu, terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan layanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan pendekatan Pemerintahan Digital, pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pendukung administrasi pemerintahan, tetapi menjadi bagian integral dari proses bisnis pemerintahan. Transformasi tersebut diarahkan untuk mendorong integrasi layanan, interoperabilitas data, penguatan tata kelola dan keamanan informasi, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan responsif.

Perubahan tujuan ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Capaian penerapan SPBE yang telah berjalan dengan baik menjadi dasar untuk melanjutkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, indikator dan sasaran kinerja perlu diarahkan agar mampu menggambarkan kemajuan transformasi digital secara lebih menyeluruh, bukan hanya capaian penerapan SPBE.

Adapun perubahan sasaran diarahkan dari sasaran yang berfokus pada peningkatan penerapan SPBE menjadi sasaran yang lebih komprehensif, yaitu terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi, efektif, efisien, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sasaran tersebut mencakup penguatan ekosistem digital pemerintahan, integrasi aplikasi dan data, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung transformasi digital daerah. Dengan demikian, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target administratif dan indikator SPBE, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan beralihnya orientasi dari SPBE menuju Pemerintahan Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi digital di daerah melalui penguatan tata kelola, integrasi teknologi dan data, keamanan informasi, inovasi layanan, serta kolaborasi lintas perangkat daerah. Perubahan tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penajaman program, kegiatan, indikator kinerja, serta target pembangunan pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 di bawah ini ;

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026
Sebelum Perubahan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	REALISASI	TARGET	
			2024	2025	2026
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	75,81	77	79
1.1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,59 (Memuaskan)	4.62 (Memuaskan)	4.65 (Memuaskan)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,89	95,90	95,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026
Setelah Perubahan

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	REALISASI	TARGET	KETERANGAN
			2025	2026	

1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	75,81	79	
1.1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel.	Indeks Pemerintah Digital Lingkup Kewenangan Diskominfo	NA	1,87	IKU 2025-2029 Reviu
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,05	96,06	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk lebih jelas review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2026 Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini;

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2026
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				34.486.193.955	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				49.633.386.057
A	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bandung		100%	33.300.493.955	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bandung		100%	47.083.386.057
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	21.678.111.054	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	23.072.129.427
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	200.000.000
01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	17.622.187.997	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	17.622.187.997

02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang	17.622.187.997	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang	17.622.187.997
3	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100%	-	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	100%	190.000.000
03	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	190.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	868.670.815	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.564.941.430
04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	68.008.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	150.000.000
05	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	74.187.892	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	118.836.540
06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	219.214.890
07	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	22.667.693	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	76.890.000
08	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	126.108.960	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	175.000.000
09	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	309.422.270	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	325.000.000

10	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	268.276.000	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporam	500.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.187.170.923	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.975.000.000
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	64.780.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	75.000.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	2.122.390.923	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	12 laporam	1.900.000.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.000.081.319	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.520.000.000
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 Unit	905.144.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29 Unit	1.100.000.000
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	94.937.219	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	220.000.000
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200.000.000

II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,4	4.879.066.700	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Layanan Informasi	1,7	10.350.000.000
			Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4				Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	
			Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	662.022.100			Nilai layanan informasi masyarakat Pemerintah Digital melalui radio	1,7	1.200.000.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,60				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,60	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	93%	5.541.088.800	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	93%	11.550.000.000
16	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	2.008.458.700	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	5.000.000.000
17	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	146.608.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	300.000.000

18	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	843.000.000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	1.000.000.000
19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	524.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	1.500.000.000
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	662.022.100	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	1.200.000.000
21	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	1.086.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	2.000.000.000
22	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	61.200.000	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	150.000.000
23	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50 orang	209.800.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	50 orang	400.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	37,00	1.085.233.300	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Aplikasi	1,70	1.193.756.630

			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	22,50	800.000.000			Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	2,00	1.105.000.000
			Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3				Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,50	4.196.060.801			Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Infrastruktur	1,70	10.162.500.000
8	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	94 Aplikasi	6.081.294.101	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perangkat Daerah yang sudah memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP))	94 %	7.500.000.000
			Cakupan leveling Pemerintahan Digital	2				Cakupan leveling Pemerintahan Digital	2	
			Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	1,64%				Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	164%	
24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	788.900.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	4.000.000.000
25	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	250.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	500.000.000
26	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah	532.160.801	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah	3.000.000.000

27	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	837.513.300	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	5 Aplikasi	921.264.630
28	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	247.720.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	272.492.000
29	Penyediaan akses internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 Perangkat Daerah	2.875.000.000	Penyediaan akses internet		Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 Perangkat Daerah	3.162.500.000
30	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	2 Dokumen	220.000.000
31	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	385.000.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,30	800.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	63	1.650.000.000
			Indeks Pembangunan Statistik	3.05				Indeks Pembangunan Statistik	3.05	
9	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	800.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	1.650.000.000
32	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	100%	250.627.600	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	900.000.000
33	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100%	292.952.300	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	400.000.000
34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 dokumen	256.420.100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	350.000.000
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Persandian	1,20	385.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Persandian	2,00	900.000.000
10	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	10 Aplikasi	385.700.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	10 Aplikasi	900.000.000

	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
35	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	10 Aplikasi	385.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Aplikasi	900.000.000

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2024-2026_Reviu

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada PD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Bandung Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada usulan-usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.



BAB III

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026, namun pada Tahun 2026 ini ada penyelarasan nomenklatur dari Kementerian Dalam Negeri pada sub kegiatan yaitu;

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c.Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e.Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Sub Kegiatan Relasi Media;
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
 - h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan akses internet
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia ;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral;
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 setelah melakukan reuiu Renstra Diskominfo 2025-2029, maka dapat di lihat pada Tabel 3.1 sebelum perubahan dan Tabel 3.2 setelah perubahan di bawah ini;

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Bandung
Sebelum Perubahan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	-	APBD		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan		APBD		1 Laporan	200.000.000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	20.522.187.997	APBD		77 orang	22.574.406.797

2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket		APBD		1 paket	190.000.000
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	3 Paket	148.960.900	APBD		Paket	163.856.990
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	24.416.568	APBD		3 Paket	26.858.225
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	22.975.491	APBD		2 paket	25.273.040
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	125.973.120	APBD		12 Dokumen	138.570.432
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	246.975.000	APBD		12 laporam	271.672.500
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	261.415.000,00	APBD		12 laporam	287.556.500
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	64.470.000	APBD		12 laporam	70.917.000
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bandung	12 laporam	2.081.147.792	APBD		12 laporam	2.289.262.571

2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	912.216.500	APBD		29 Unit	1.003.438.150
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	204 Unit	96.266.000	APBD		12 laporam	105.892.600
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 unit		APBD		1 Unit	-
							Kota Bandung			APBD			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	3,0		APBD		3,0	
						Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung	4		APBD		4	
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung	0,4		APBD		0,4	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,60		APBD		88,70	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	93%		APBD		94%	
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif	Kota Bandung	4 Laporan	1.800.000.000	APBD		4 Laporan	1.980.000.000

						dalam kegiatan relasi media							
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	1 Komunitas	146.608.000	APBD		1 Komunitas	161.268.800
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	5 permohonan	843.000.000	APBD		5 permohonan	927.300.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	3 Rekomendasi	524.000.000	APBD		3 Rekomendasi	576.400.000
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Bandung	1 media	862.022.100			1 media	948.224.310
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Bandung	10 dokumen	1.086.000.000			10 dokumen	1.194.600.000
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	12 konten	61.200.000			12 konten	67.320.000
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	300 orang	30.733.300			300 orang	33.806.630
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Kota Bandung	10,00		APBD		10,00	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Kota Bandung	16,20		APBD		16,20	
						Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Bandung	3,00				3,00	

						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	10,00		APBD		10,00	
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	Kota Bandung	114 Aplikasi		APBD		118 Aplikasi	
						Cakupan leveling Pemerintahan Digital		2				3	
						Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah		100				100	
2	16	03	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Bandung	35 Aplikasi	700.900.000	APBD		35 Aplikasi	4.000.000.000
2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Bandung	1 dokumen	251.525.400	APBD		1 dokumen	500.000.000
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	200 PD	502.160.801	APBD		200 PD	3.000.000.000
2	16	03	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Bandung	5 Aplikasi	837.513.300	APBD		5 Aplikasi	1.000.000.000
2	16	03	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	207.719.000	APBD		4 aplikasi	500.000.000

2	16	03	2.02	36	Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	200 PD	1.875.000.000	APBD		200 PD	3.000.000.000
2	16	03	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	300.000.000
2	16	03	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	2 Dokumen	300.000.000	APBD		2 Dokumen	500.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					APBD			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	5,80		APBD		5,80	
						Indeks Pembangunan Statistik		3,05				3,06	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	100%	200.627.600	APBD		100%	4.000.000.000

				0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	100%	242.952.300	APBD		100%	500.000.000
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	30 Orang	206.420.100	APBD		30 orang	3.000.000.000
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					APBD			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	3,70		APBD		3,70	
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	7 Aplikasi		APBD		7 Aplikasi	
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		7 Perangkat Daerah	335.700.000	APBD		7 Perangkat Daerah	900.000.000
					JUMLAH				35.721.086.269				53.536.624.545

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Bandung
Sesudah Perubahan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2026 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%	-		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			1 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			1 Laporan	

2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	20.114.361.114,25		77 orang	22.125.797.226
2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			1 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket			1 paket	190.000.000
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	100%			7 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	3 Paket	405.498.576,22		Paket	446.048.434
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	62.041.766,70		3 Paket	68.245.943
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	18.763.590,51		2 paket	20.639.950
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	25.235.436,00		12 Dokumen	27.758.980
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	505.659.000,00		12 laporam	556.224.900
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	202.891.000,00		12 laporam	223.180.100
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			2 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	30.682.500,00		12 laporam	33.750.750
2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Bandung	12 laporam	3.045.626.713,08		12 laporam	3.350.189.384

2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	100%			3 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	843.429.340,00		29 Unit	927.772.274
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	204 Unit	190.409.400,00		12 laporam	209.450.340
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 unit			1 Unit	-
							Kota Bandung					
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	1,90			1,90	
						Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kota Bandung	4			4	
						Nilai Penerapan Pemerintah Digital layanan informasi masyarakat melalui Radio Sonata	Kota Bandung	1,90			1,90	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,60			88,70	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	93%			94%	

2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Bandung	4 Laporan	3.469.281.516,24		4 Laporan	3.816.209.668
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	1 Komunitas	18.555.500		1 Komunitas	20.411.050
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	5 permohonan	483.000.000		5 permohonan	531.300.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	3 Rekomendasi	1.096.452.500		3 Rekomendasi	1.206.097.750
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Bandung	1 media	1.103.356.460		1 media	1.213.692.106
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Bandung	10 dokumen	210.000.000		10 dokumen	231.000.000
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	12 konten	61.200.000		12 konten	67.320.000
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	50 orang	30.733.300		300 orang	33.806.630
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Aplikasi	Kota Bandung	1,70			2,00	
						Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	Kota Bandung	2,00			2,00	

						Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Pemerintah Digital	Kota Bandung	3			3	
						Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	1,70			2,00	
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang sudah memanfaatkan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP))	Kota Bandung	94%			95%	
						Cakupan leveling Pemerintahan Digital		2			2,2	
						Prosentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah		1,64			1,64	
2	16	03	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Kota Bandung	35 Aplikasi	1.356.100.000		35 Aplikasi	4.000.000.000
2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Bandung	1 dokumen	251.525.400		1 dokumen	500.000.000
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	1 Perangkat Daerah	2.912.160.801		1 Perangkat Daerah	3.000.000.000
2	16	03	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Kota Bandung	5 Aplikasi	837.513.300		5 Aplikasi	1.000.000.000
2	16	03	2.02	34	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	177.020.000		4 aplikasi	500.000.000

2	16	03	2.02	36	Penyediaan akses internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	1 Perangkat Daerah	1.176.054.000		1 Perangkat Daerah	3.000.000.000
2	16	03	2.02	37	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Kota Bandung	2 Dokumen	200.000.000		2 Dokumen	300.000.000
2	16	03	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	2 Dokumen	300.000.000		2 Dokumen	500.000.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	Kota Bandung	63			68	
						Indeks Pembangunan Statistik		3,05			3,05	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%			100%	
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Kota Bandung	100%	200.627.600		100%	4.000.000.000
				0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kota Bandung	100%	236.211.000		100%	500.000.000
2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Bandung	30 Orang	213.161.400		30 orang	3.000.000.000

2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan Pemerintah Digital lingkup Persandian	Kota Bandung	2,00			2,00	
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	7 Aplikasi			7 Aplikasi	
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		7 Perangkat Daerah	335.700.000		7 Perangkat Daerah	900.000.000
					JUMLAH				40.113.251.214			55.798.895.484

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk mencapai rencana dan tujuan diperlukan mitra kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dalam mendukung pelayanan, kinerja maupun data pendukung dari berbagai perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Bandung.

Data Mitra Perangkat Daerah Dalam Mendukung Kinerja Diskominfo

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA DIINTERVENSI	MITRA PERANGKAT DAERAH	URAIAN
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan SPBE	Bapperida Inspektorat Bagian Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Tata Kelola SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, DPMPTSP, DISDUKCAPIL, Bag. Organisasi, Bag. Pengadaan	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Manajemen SPBE	Bapperida, Inspektorat, BKAD, BKPSDM, Disarpus, Bag. Organisasi, Bag. Balap	Tersedianya dokumen SPBE
		Aspek Layanan SPBE	Disdukcapil, DPMPTSP, Disnaker, Bag. Hukum	Tersedianya dokumen SPBE
2	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Layanan dinas ke masyarakat	Bagian Organisasi	Tersedianya dokumen IKM

Sedangkan mitra kerja PD selain mendukung Indikator Kinerja Utama juga mendukung kinerja layanan kepada masyarakat, yaitu;

NO	LEMBAGA/ KEMENTERIAN/ PD/ ORGANISASI	URAIAN	KETERANGAN
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Evaluasi dan penilaian Smart City;	Nilai Smart City

2	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Evaluasi dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai SPBE
3	Badan Siberi dan Sandi Nasional (BSSN)	Pelatihan keamanan data dan sertifikasi keamanan informasi	Sertifikasi
4	BPS Kota Bandung	Data Bandung satu Data	
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kerjasama sosialisasi kepada masyarakat	Sosialisasi di tingkat kelurahan
6	Relawan TIK (RTIK)	Sosialisasi di kalangan pelajar dan mahasiswa serta generasi muda	
7	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung	Bandung Open Data, Keterbukaan Informasi Publik, Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR) dan sebagainya.	



BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Reviu 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2026 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

4.1 Catatan Penting

Renja Perubahan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, catatan penting yang umumnya perlu diperhatikan antara lain:

1. Dasar perubahan Renja

- Perubahan RKPD Tahun 2026.
 - Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
 - Hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan semester I 2026.
 - Penyesuaian dengan kebijakan nasional/provinsi dan prioritas kepala daerah.
2. Evaluasi capaian sampai semester I
- Realisasi fisik dan keuangan setiap program/kegiatan.
 - Capaian indikator kinerja.
 - Kegiatan yang sudah selesai, sedang berjalan, tertunda, atau tidak dapat dilaksanakan.
 - Faktor penyebab deviasi target dan anggaran.
3. Penyesuaian program/kegiatan
- Menambah, mengurangi, menggeser, atau menghapus kegiatan sesuai kebutuhan aktual.
 - Memastikan seluruh kegiatan perubahan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.
 - Menghindari kegiatan yang tidak memiliki output dan indikator yang jelas.
4. Bidang prioritas Diskominfo
- Penguatan SPBE dan transformasi digital pemerintahan.
 - Pengelolaan dan integrasi data pemerintah daerah.
 - Keamanan informasi dan persandian.
 - Infrastruktur jaringan dan konektivitas perangkat daerah.
 - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - Statistik sektoral.
 - Pengembangan layanan digital dan keterbukaan informasi publik.
5. Indikator kinerja
- Target harus realistis terhadap sisa waktu pelaksanaan tahun 2026.
 - Indikator harus dapat diukur dan memiliki sumber data yang jelas.

- Perubahan target perlu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Anggaran

- Setiap perubahan pagu harus konsisten antara Renja Perubahan, RKA, dan rancangan perubahan APBD.
- Periksa kembali kesesuaian antara anggaran dengan output kegiatan.
- Prioritaskan belanja yang benar-benar mendukung pencapaian target kinerja.
- Perhatikan efisiensi dan potensi pengadaan yang tidak dapat diselesaikan dalam sisa tahun anggaran.

7. Konsistensi dokumen perencanaan

- Selaraskan Renja Perubahan Diskominfo → Perubahan RKPD → KUA-PPAS Perubahan → RKA Perubahan → APBD Perubahan.
- Pastikan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pagu konsisten.

8. Catatan risiko

- Keterlambatan pengadaan/perangkat jaringan.
- Keterbatasan SDM pengelola teknologi informasi.
- Keamanan siber dan perlindungan data.
- Ketergantungan terhadap integrasi sistem dari perangkat daerah lain.
- Kegiatan yang memiliki waktu pelaksanaan pendek setelah perubahan APBD ditetapkan.

Renja Perubahan sebaiknya tidak sekadar menjadi dokumen penyesuaian anggaran, tetapi menunjukkan mengapa perubahan diperlukan, apa yang berubah, berapa capaian sampai Triwulan II, apa target sampai akhir 2026, dan bagaimana perubahan tersebut mendukung prioritas pembangunan daerah.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, substansinya dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan

Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2026 harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD/RPD yang berlaku, RKPD Perubahan Tahun 2026, serta kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

2. Konsistensi perencanaan dan penganggaran

Program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu anggaran harus konsisten antara Renja Perubahan dengan dokumen penganggaran dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Berorientasi pada hasil Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mencapai output dan outcome yang telah ditetapkan, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran. Setiap kegiatan harus memberikan manfaat yang terukur bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Efektivitas dan efisiensi

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan pada tahun anggaran berjalan.

5. Prioritas terhadap target yang belum tercapai Kegiatan yang mengalami keterlambatan atau belum mencapai

//

target sampai dengan semester I harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan perubahan, dengan melakukan percepatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penguatan transformasi digital

Pelaksanaan Renja Perubahan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data, keamanan informasi, dan peningkatan kualitas layanan digital pemerintah daerah.

7. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi harus mendukung penyediaan informasi publik yang akurat, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan serta meningkatkan keterbukaan informasi pemerintah daerah.

8. Penguatan statistik sektoral dan data daerah
Pengelolaan data dan statistik sektoral dilaksanakan secara terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

9. Keamanan informasi dan persandian setiap penyelenggaraan layanan dan sistem informasi memperhatikan aspek keamanan informasi, perlindungan data, manajemen risiko, serta penerapan persandian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Koordinasi dan sinergi

Pelaksanaan Renja Perubahan dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan untuk memastikan integrasi layanan serta data.

11. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi fisik, keuangan, indikator kinerja, serta permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan tindakan korektif apabila diperlukan.

12. Akuntabilitas dan kepatuhan

Seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan penyesuaian program dan kegiatan terhadap kondisi aktual, mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Pelaksanaannya perlu didukung koordinasi lintas perangkat daerah, pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan, serta penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, 13 Agustus 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung



HENRYCO ARIE SAPIIE, SE.Ak
Pembina TK.I/IVb
19710621 199806 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CROSSCUTTING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Cascading 2025 - 2029 Pelaksanaan Program Diskominfo Kota Bandung



